

Arsitektur *Enterprise* Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada *Domain* Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Enterprise Architecture of Electronic Based Government System (SPBE) in Business Process Domain in The Regional Government of Purwakarta Regency

1st Nurfadilah
Fakultas Rekayasa Industri
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia
nurfadilah@student.telkomuniversity.ac.id

2nd Ari Fajar Santoso
Fakultas Rekayasa Industri
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia
arifajar@telkomuniversity.ac.id

3rd Falahah
Fakultas Rekayasa Industri
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia
falahah@telkomuniversity.ac.id

Abstrak—Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal perlu melakukan standarisasi dengan mengikuti Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 untuk meningkatkan kematangan teknologi informasi yang salah satunya pada bidang pemerintahan. Hal ini juga bisa mendorong Pemerintahan Indonesia untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai salah satu tujuan penerapan SPBE adalah untuk membuat pelayanan publik yang terperinci dan terpercaya. Salah satu Kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan SPBE adalah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Perancangan *Enterprise Architecture* (EA) pada penelitian ini mengacu pada arsitektur SPBE dan TOGAF ADM. Pada perancangan EA SPBE dalam penelitian ini dimulai dari fase *preliminary*, fase *architecture vision*, dan fase arsitektur proses bisnis. Di setiap fase EA SPBE dalam penelitian ini menghasilkan *output* berupa artefak yang isinya *matrix*, *catalog* dan *diagram*. Sebagai arahan proses bisnis yang sesuai dengan PermenPANRB No.19 tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis. Proses bisnis salah satu domain penting agar dapat terimplementasi dan terintegrasi pada domain data, domain

layanan, domain aplikasi dan domain infrastruktur pada bidang pemerintahan. Salah satu tujuan untuk membuat kerangka kerja yang dapat digunakan untuk merancang arsitektur SPBE yakni menggunakan *Enterprise Architecture* (EA).

Kata Kunci — sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), kabupaten purwakarta, *enterprise architecture*, TOGAF ADM, proses bisnis.

Abstract—By optimally utilizing technological advances, it is necessary to standardize by following Peraturan Presiden No. 95 of 2018 to increase the maturity of information technology, one of which is in the government sector. This can also encourage the Indonesian Government to implement an Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). One of the objectives of implementing SPBE is to provide detailed and reliable public services. One of the districts in Indonesia that has implemented SPBE is Purwakarta Regency, West Java. The design of *Enterprise Architecture* (EA) in this study refers to the SPBE and TOGAF ADM architectures. In

designing the EA SPBE in this study, starting from the preliminary phase, the architecture vision phase, and the business process architecture phase. In each phase of the EA SPBE in this study, it produces output in the form of artifacts containing matrix, catalog and diagrams. As a business process direction in accordance with PermenPANRB No.19 of 2018 concerning Business Process Preparation. Business processes are one of the important domains so that they can be implemented and integrated in the data domain, service domain, application domain and infrastructure domain in the government sector. One of the goals to create a framework that can be used to design the SPBE architecture is to use Enterprise Architecture (EA).

Keywords: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Purwakarta Regency, Enterprise Architecture, TOGAF ADM, Business Process.

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan teknologi informasi sekarang ini mendorong sistem pemerintahan di Indonesia untuk memperhatikan kondisi eksisting yang sedang berjalan agar terintegrasi antara proses bisnis dan teknologi yang akan digunakan dapat meningkatkan kualitas kerja agar bisa terhubung dengan sistem pemerintahan agar terwujud pelayanan kepada publik yang lebih baik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 [1]. Berdasarkan situs resmi milik Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia yaitu menpan.go.id yang menampilkan hasil *United Nations (UN) e-Government Survey 2020* yang merilis peringkat *e-Government Development Index (EGDI)*. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai *Very High EGDI*, untuk poin 0.50 sampai 0.75 sebagai *High EGDI*, poin 0.25 sampai 0.50 sebagai *Middle EGDI*, dan kurang dari 0.25 sebagai *Low EGDI*. Secara keseluruhan, di tahun 2020 Indonesia mendapat poin EGDI 0.6612 dan masuk ke dalam peringkat *High EGDI*. Berdasarkan hasil tersebut, Indonesia masuk 100 besar peringkat dunia di posisi 88 dari 193 negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia berada di atas negara Cambodia dengan poin 0.5113 (*High EGDI*), Timor-Leste dengan poin 0.4649 (*Middle EGDI*), Myanmar dengan

poin 0.4316 (*Middle EGDI*), dan Laos dengan poin 0.3288 (*Middle EGDI*) se-wilayah Asia Tenggara. Dengan hasil tersebut juga menunjukkan penerapan SPBE yang dilakukan Pemerintah Indonesia mengalami peningkatan 19 peringkat dari penilaian sebelumnya Indonesia berada pada urutan 107 di tahun 2018 [2]. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE untuk mengukur tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah [3]. Pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggambaran arsitektur EA di domain proses bisnis SPBE Kabupaten Purwakarta dengan menerapkan model arsitektur SPBE dan metode TOGAF ADM (*Architecture Development Method*). Penyusunan proses bisnis SPBE mengacu kepada PermenPANRB No. 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis. TOGAF ADM merupakan metode pengembangan EA yang umum dan bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi serta dapat digabungkan dengan kerangka kerja lain untuk menghasilkan arsitektur yang spesifik. TOGAF memberikan metode yang kompleks mengenai bagaimana cara membangun, mengelola dan mengimplementasikan arsitektur enterprise yang bisa disebut dengan *Architecture Development Method (ADM)* [4]. Dengan menggunakan metode ADM maka dapat mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, selain itu juga diharapkan dapat menciptakan rancangan yang akan digunakan untuk membuat sistem baru yang bisa membantu dalam kegiatan perusahaan [5].

II. KAJIAN TEORI

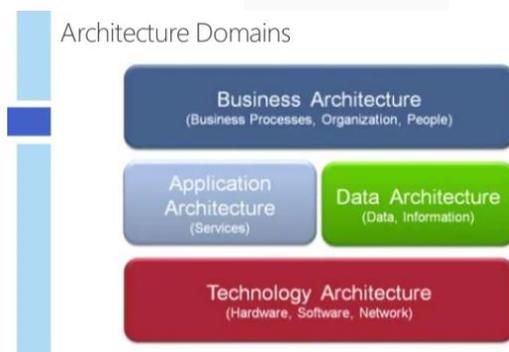
A. Enterprise Architecture

Enterprise merupakan bisnis, layanan atau dapat berupa lembaga pemerintah, sebuah organisasi, sebuah bagian dalam organisasi, sebuah departemen atau sebuah rangkaian organisasi yang terpisah secara geografis dan dihubungkan oleh kepemilikan bersama. Sedangkan *Architecture* adalah suatu deskripsi formal suatu sistem, atau sebuah rencana rinci mengenai sistem pada tingkat komponen sebagai panduan implementasi, dapat disimpulkan bahwa *Enterprise Architecture*

adalah kumpulan aset data, informasi, strategi dan teknologi suatu organisasi yang saling terkait dan terhubung satu sama lain serta didefinisikan secara rinci guna mendukung pengembangan penerapan strategi organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi. Kerangka kerja EA adalah metode, teknik, dan alat yang dapat digunakan oleh organisasi dalam mengembangkan cakupan luas dari arsitektur-arsitektur yang berbeda, sehingga memungkinkan organisasi dalam membuat struktur, klasifikasi dan dokumen tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan sistem dalam suatu organisasi [6].

B. TOGAF ADM

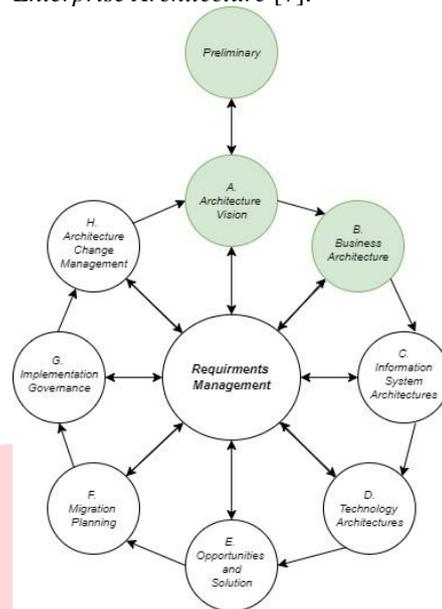
TOGAF adalah kerangka kerja terbuka, menyediakan metode langkah demi langkah yang praktis, definitif, dan terbukti untuk mengembangkan dan memelihara arsitektur perusahaan. Kunci TOGAF tetap menjadi metode yang andal dan praktis. Metode Pengembangan Arsitektur TOGAF (ADM) untuk mendefinisikan kebutuhan bisnis dan mengembangkan arsitektur yang memenuhi kebutuhan tersebut, menerapkan elemen TOGAF dan aset arsitektur lain yang tersedia untuk organisasi yaitu ada 4 (empat) domain utama pada TOGAF yang umumnya diterima menjadi himpunan bagian dari EA secara keseluruhan, yaitu bisnis, data, aplikasi dan teknologi [7].



GAMBAR 1 DOMAIN ARSITEKTUR TOGAF

TOGAF ADM berfungsi sebagai metode pengembangan arsitektur yang berhubungan dengan kebutuhan sistem dan organisasi dan tidak bersifat *best practice*, artinya dalam pengembangannya TOGAF ADM dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. ADM terdiri dari sembilan tahapan, dimana setiap tahapan menggambarkan kumpulan aktivitas yang memungkinkan

stakeholder mencapai keutusan dalam *Enterprise Architecture* [7].



GAMBAR 1. FASE TOGAF ADM

C. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam Perpres No.19 Tahun 2018 Pasal 1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tujuan dari adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. SPBE memiliki domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, domain arsitektur layanan SPBE [8].

D. Domain Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan asset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi kedalam satu kesatuan dokumen atau bisnis data sehingga perlu disusun kerangka dasarnya. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi guna memastikan akurasi dan kelengkapan proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis

organisasi. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat dalam bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat dalam bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan arsitektur proses bisnis yang jelas dan mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi [9].

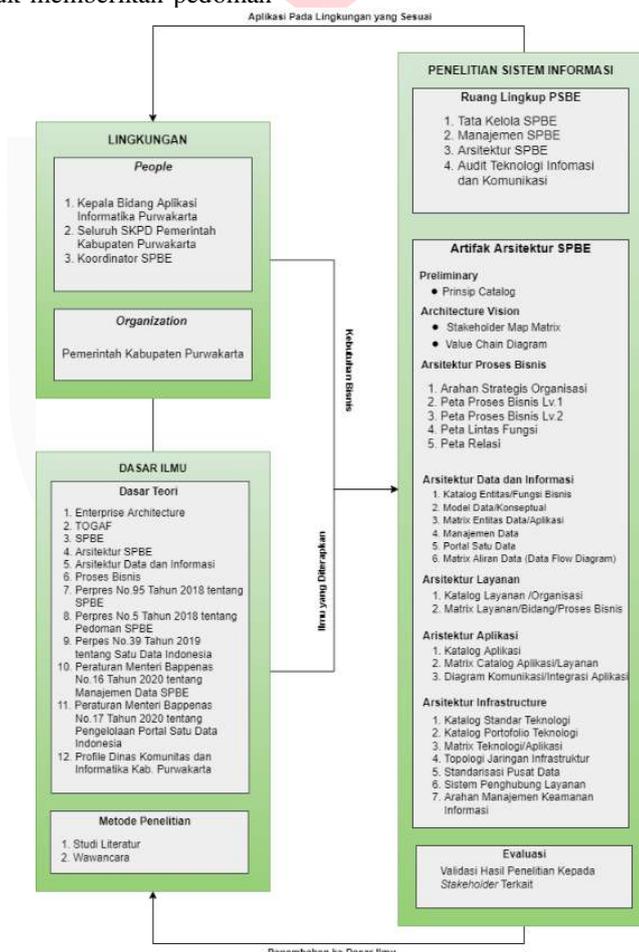
E. Peta Proses Bisnis

Di dalam Perpres No.95 tahun 2018 pasal 1 peta rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah Langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Untuk lebih jelasnya dijelaskan di pasal 23 tentang proses bisnis ayat (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman

dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE ayat (2) Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan ayat (3) Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah [10].

III. METODE

Model Konseptual merupakan sebuah gambar atau model yang terdiri dari elemen-elemen dengan fungsi untuk mengidentifikasi data pada proses penelitian. Model konseptual ini diharapkan dapat memetakan arahan yang jelas dan terperinci terkait bagian-bagian yang akan menjadi poin penelitian. Adapun model konseptual dalam perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada domain proses bisnis dibagi menjadi tiga elemen yaitu lingkungan, penelitian sistem informasi, dan dasar ilmu.



GAMBAR 2
MODEL KONSEPTUAL

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fase Preliminary

Fase *preliminary* merupakan fase awal dalam melakukan persiapan dan inisiasi perancangan kebutuhan bisnis suatu organisasi. Pada fase

ini terdapat tahapan yaitu menentukan kapabilitas arsitektur yang sesuai melalui prinsip arsitektur pada suatu organisasi. Prinsip tersebut kedepannya akan dijadikan landasan dan dasar perancangan EA yang akan dibuat. Artefak yang dihasilkan pada fase ini adalah *principles catalog* arsitektur bisnis.

TABEL 1
PRINCIPLE CATALOG

No	Prinsip Bisnis	Deskripsi
1.	Berlandaskan Hukum	Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara.
2.	Akuntabel	Penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik, utuh dan terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah maupun dapat menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.
3.	Berorientasi pada pelayanan	Arsitektur dibuat berdasarkan desain yang mencerminkan proses

No	Prinsip Bisnis	Deskripsi
		bisnis pelayanan keadaan sebenarnya.
4.	Ketergunaan	Arsitektur dibuat berdasarkan prinsip yang dimiliki arsip bahwa arsip memiliki sifat ketergunaan.
5.	Business Continuity	Proses bisnis yang ada oleh suatu instansi harus dipertahankan dan terus dijalankan sekalipun terdapat gangguan sistem
6.	Berlandaskan kebijakan dan regulasi undang-undang	Seluruh kegiatan dan proses bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan kebijakan dan regulasi undang-undang yang berlaku

B. Fase Architecture Vision

Fase *architecture vision* merupakan tahap dan fase pertama di dalam *cycle TOGAF ADM*. Pada fase ini mendeskripsikan tujuan utama dan batasan arsitektur dalam perancangan EA. Di dalam perancangan EA termasuk penentuan ruang lingkup arsitektur yang akan dibangun, *stakeholder* yang mendukung perancangan EA dan SPBE di Kabupaten Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Artefak yang dihasilkan dalam fase ini yaitu *value chain diagram* dan *stakeholder map matrix*.

TABEL 2
STAKEHOLDER PEMDA KAB. PURWAKARTA

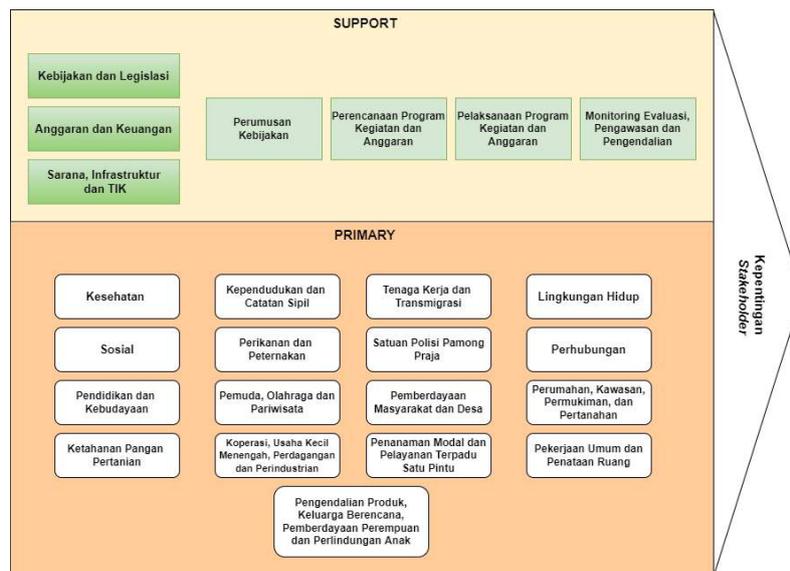
No	Stakeholder	Role
1.	Bupati	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPBE di Diskominfo Kabupaten Purwakarta dan memimpin
2.	Sekretaris Daerah	Mengkoordinasikan penerapan kebijakan SPBE. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Instansi pusat dan Pemda lain.
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bertanggung jawab perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terkait kebijakan, program, dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Serta, mengelola terkait arsitektur SPBE.
4.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mengkoordinasikan integrasi proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)	Bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, serta urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
6.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)	Mengkoordinasikan penganggaran SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

1. Value Chain Diagram

Rantai nilai atau *value chain* adalah serangkaian kegiatan bisnis yang menggambarkan nilai yang dimiliki oleh suatu organisasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang

ada di dalam instansi untuk mencapai tujuan instansi. Kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan utama (*primary activities*) dan kegiatan pendukung (*support activities*). Berikut adalah Gambar 4

value chain diagram Pemda Kabupaten Purwakarta.



GAMBAR 4
VALUE CHAIN DIAGRAM

C. Business Architecture

Proses Bisnis merupakan tahapan utama dalam proses perancangan *Enterprise Architecture* yang mendeskripsikan interaksi bisnis yang dijalankan oleh instansi untuk mencapai layanan yang terintegrasi serta tujuan yang diinginkan. Model perancangan arsitektur proses bisnis EA SPBE ini mengacu pada Amanah Perpres No.95 tahun 2018 serta PermenPANRB No.19 tahun 2018. Artefak yang dihasilkan pada perancangan arsitektur

proses bisnis ini yaitu proses bisnis level 0 dan level 1, peta relasi, peta lintas fungsi, dan peta relasi aplikasi proses bisnis

1. Goal Catalog

Goal Catalog berfungsi mempermudah dalam menunjukkan keterkaitan antara *sub-goal* dengan *goal* secara lebih detail. Berikut merupakan Tabel 3 *goal catalog* arsitektur SPBE Pemerintah Purwakarta.

TABEL 3
GOAL CATALOG

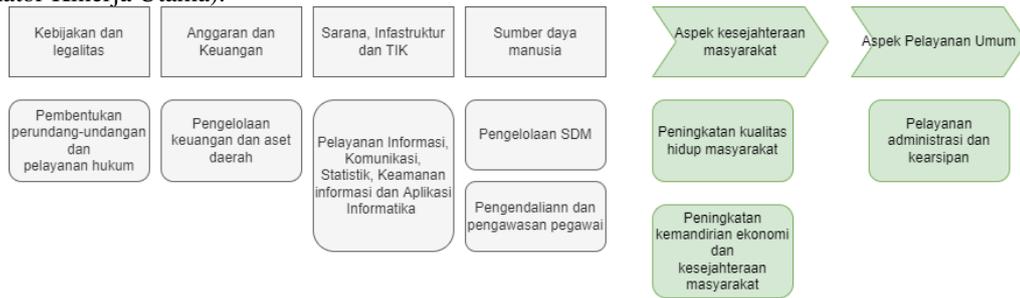
No	Goal dan sub-Goal	Deskripsi
1	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas	Menerapkan system tatakelola yang terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1.1	Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Peningkatan nilai integritas dalam urusan penyelenggaraan pemerintah dengan melakukan audit serta kontroling dalam birokrasi
1.2	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Peningkatan profesionalitas SDM ASN dalam melakukan peningkatan pelayanan
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif	Menerapkan perancangan SPBE untuk meningkatkan Tatakelola pemerintah yang lebih efektif
2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Penyelenggaraan pemerintah berbasis pelayanan digital untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkat pelayanan yang baik dan efektif serta meningkatkan performance birokrasi
2.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	Implementasi pelayanan modern melalui program satu pintu untuk mendapatkan solusi berupa modern system dalam penyelenggaraan pemerintahan

2. Functional Decomposition Diagram

Artefak *Functional Decomposition Diagram* merupakan artefak yang menggambarkan sub fungsi yang terdapat pada fungsi Pemda Kabupaten Purwakarta. Artefak ini dirancang berdasarkan Gambar V.1 *Value Chain Diagram*

dan hasil dari dokumen kedudukan, susunan organisasi, serta tugas dan fungsi. Pada Gambar 5 *Functional Decomposition Diagram* mengidentifikasi sub fungsi yang terdapat dalam fungsi bisnis Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Umum

Pemda Kabupaten Purwakarta menurut IKU (Indikator Kinerja Utama).

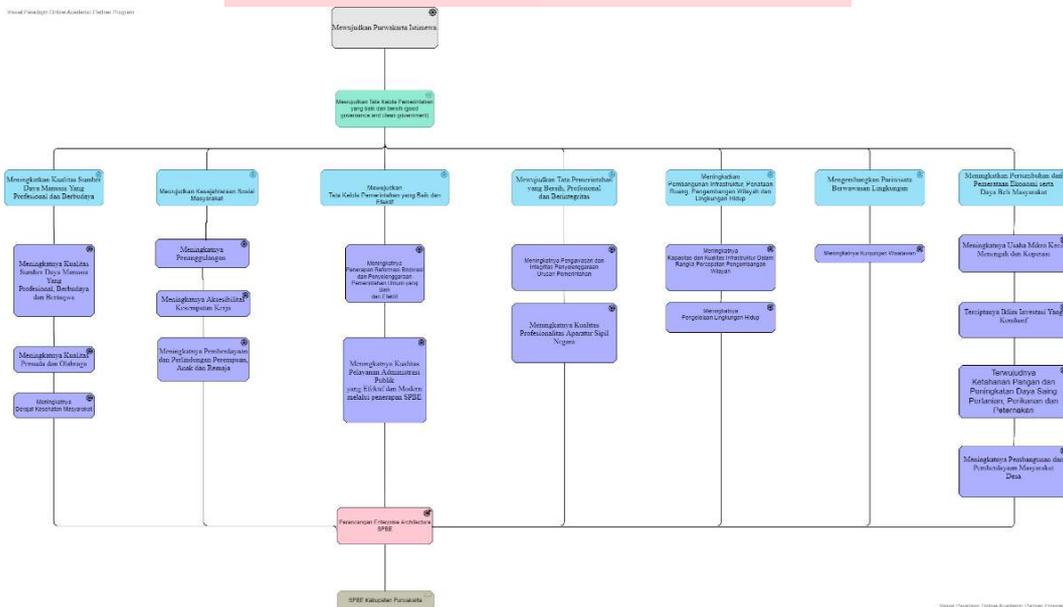


GAMBAR 3
FUNCTIONAL DECOMPOSITION DIAGRAM

3. Business Footprint Diagram

Artefak *Business Footprint Diagram* merupakan artefak yang memodelkan hubungan antara *driver*, *goal*, *objective*, dan *capability*. Artefak ini disusun berdasarkan hasil analisis dokumen

profil dan rencana strategis. Pada Gambar 6 *Business Footprint Diagram* menggambarkan hubungan antara *driver*, *goal*, *objective*, dan *capability* pada Pemda Kabupaten Purwakarta.



GAMBAR 4.
BUSINESS FOOTPRINT DIAGRAM

4. Business Requirement

Requirement Arsitektur Proses Bisnis dibuat berdasarkan kebutuhan Pemda Kabupaten Purwakarta dari *Principle Catalog* yang telah terdefinisi sebelumnya. *Requirement* yang diidentifikasi akan dijadikan acuan dalam pemenuhan kebutuhan untuk membangun arsitektur proses bisnis berdasarkan rencana

strategis SPBE pada Perpres No.95 tahun 2018. Penyusunan proses bisnis juga harus memenuhi prinsip berdasarkan PermenPANRB No.19 tahun 2018 serta indikator tingkat kematangan berdasarkan PermenPANRB No.59 tahun 2020. Pada Tabel 4 akan menjelaskan *requirement* arsitektur proses bisnis yang dibutuhkan.

TABEL 4
BUSINESS REQUIREMENT

No	Business Requirement
1	Menyelaraskan Visi dan Misi dengan menerapkan prinsip-prinsip tujuan goals pemerintah berbasis SPBE pada setiap proses bisnis seluruh SKPD
2	Proses bisnis yang dimiliki terdefinisi dan selaras dengan rencana strategis (RENSTRA).

3	Penyelarasan sistem informasi di setiap proses bisnis oleh setiap SKPD yang memiliki kemampuan integrasi pelayanan terpadu satu pintu
4	Pengembangan integrasi aplikasi dengan proses bisnis yang ada untuk menghasilkan layanan yang optimal
5	Pengoptimalan sumber daya dan insfrastruktur dalam implementasi TI

5. Model Peta Proses Bisnis Level 0

Pada peta proses bisnis level 0 yang merupakan model peta proses bisnis yang membuat penggambaran keseluruhan proses untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi. Untuk menentukan pemetaan model pada peta proses bisnis level 0 Kabupaten Purwakarta ini diidentifikasi

berdasarkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Purwakarta yang tertera di dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023. Berikut merupakan Gambar 7 proses bisnis level 0 dan proses bisnis utama, proses manajerial, serta proses pendukung Kabupaten Purwakarta.



GAMBAR 5
MODEL PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

Pada proses bisnis utama dan prosis pendukung Kabupaten Purwakarta terdapat 12 proses yang telah digambarkan. Proses utama merupakan proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal pemerintahan serta berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi pemerintahan. Adapun proses manajerial merupakan proses yang mengatur segala sesuatu dengan benar dan melakukan pengarahannya demi tercapainya suatu tujuan internal maupun eksternal. Serta proses pendukung merupakan proses untuk mendukung pengelolaan operasional dari suatu sistem pemerintahan serta memenuhi kebutuhan pengguna internal. Tabel 5 dibawah ini merupakan penjelasan mengenai isi dari peta proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung Kabupaten Purwakarta.

TABEL 5
DESKRIPSI PETA PROSES BISNIS LEVEL 0

Kode Proses	Nama Proses	Tipe Proses
KabPwk 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan	Utama

KabPwk 2	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	Utama
KabPwk 3	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Utama
KabPwk 4	Peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Utama
KabPwk 5	Pelayanan administrasi dan kearsipan	Pendukung
KabPwk 6	Pelayanan Informasi, Komunikasi, Statistik, Keamanan informasi dan Aplikasi Informatika	Pendukung
KabPwk 7	Pembentukan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Pendukung
KabPwk 8	Perencanaan pembangunan daerah	Manajerial
KabPwk 9	Pengelolaan SDM	Manajerial
KabPwk 10	Pengendalian dan pengawasan	Manajerial
KabPwk 11	Pengelolaan pemerintahan dan organisasi	Manajerial
KabPwk 12	Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Manajerial

6. Model Peta Proses Bisnis Level 1
 Pada peta proses bisnis level 1 ini merupakan model peta proses bisnis yang didalamnya terdapat sub-proses sebagai penggambaran lebih rinci dari masing-masing proses di proses bisnis level 0. Untuk menentukan pemetaan peta proses bisnis level 1 Diskominfo Kabupaten Purwakarta yang diidentifikasi berdasarkan program prioritas

pembangunan daerah pada tahun 2021-2023 yang ingin dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Purwakarta yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023. Di bawah ini merupakan Gambar 8 peta proses bisnis level 1 dari masing-masing proses bisnis dari level 0 di Kabupaten Purwakarta.



GAMBAR 6
 MODEL PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

7. Peta Relasi Proses Bisnis
 Peta relasi proses bisnis merupakan peta yang berfungsi sebagai gambaran eksisting siapa saja pihak internal Pemda Kabupaten Purwakarta yang terlibat di dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Penggambaran

setiap peta relasi disesuaikan seperti peta proses bisnis level 0 yaitu mulai dari proses utama, proses pendukung dan proses manajerial. Mulai dari proses KabPwk 1 hingga proses KabPwk 12 digambarkan perangkat daerah yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya.



GAMBAR 7
 PETA RELASI PROSES BISNIS (PROSES UTAMA)



GAMBAR 8
PETA RELASI PROSES BISNIS (PROSES PENDUKUNG)



GAMBAR 9
PETA RELASI PROSES BISNIS (PROSES MANAJERIAL)

8. GAP Analysis
 GAP Analysis Arsitektur Proses Bisnis memiliki tujuan untuk memberikan validasi dan evaluasi kebutuhan bisnis sebagai bahan pengembangan arsitektur selanjutnya. Untuk melakukan identifikasi kebutuhan untuk mencapai kinerja yang diharapkan akan dijelaskan pada Tabel 6 GAP Analysis Arsitektur Proses Bisnis.

TABEL 6
GAP ANALYSIS

No	Requirement	Fullfilment			Keterangan	Solusi
		N	P	F		
1	Menyelaraskan Visi dan Misi dengan menerapkan prinsip-prinsip tujuan goals pemerintah berbasis SPBE pada setiap proses bisnis seluruh SKPD		√		Pemetaan dan strategis terhadap Menyelaraskan Visi dan Misi dengan menerapkan SPBE pada setiap proses bisnis seluruh SKPD	Mengadakan sosialisasi mengenai penerapan peraturan Diskominfo manajemen TI dan prinsip SPBE dalam setiap layanan pemerintahan dan publik
2	Proses bisnis yang dimiliki terdefinisi dan selaras dengan rencana strategis (RENSTRA).		√		Proses bisnis Kabupaten sudah menjelaskan gambaran lintas fungsi dari masing - masing perangkat daerah dalam melaksanakan tugas untuk mendukung visi dan misi Kabupaten	Melakukan penggambaran ulang mengenai model peta proses bisnis level 1 dan level 2 sesuai pedoman PermenPANRB N0.19 tahun 2018
3	Penyelarasan sistem informasi di setiap proses bisnis oleh setiap SKPD yang memiliki kemampuan integrasi pelayanan terpadu satu pintu		√		Penyelarasan sistem bagi pakai data sebagai bentuk integrasi sudah diamanatkan dalam PERDA tentang SPBE	Melakukan pengoptimalan dalam penggunaan aplikasiumum dalam urusan layanan pemerintah serta

No	Requirement	Fulfillment			Keterangan	Solusi
		N	P	F		
						perancangan sistem bagi pakai data
4	Pengembangan integrasi aplikasi dengan proses bisnis yang ada untuk menghasilkan layanan yang optimal		√		Pengembangan aplikasi dilakukan berdasarkan kebutuhan perangkat daerah, akan tetapi pengisian data di dalam aplikasi tersebut masih belum optimal	Melakukan perancangan pengembangan integrasi antar aplikasi
5	Pengoptimalan sumber daya dan infrastruktur dalam implementasi TI		√		Sumberdaya manusia dan infrastruktur TIK di Kabupaten Purakarta masih belum ideal sehingga untuk penanganan kendala dan gangguan masih memerlukan bantuan dari pihak ke-3	Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis dan mengusulkan peningkatan infrastruktur TI yang ada ke Pusat untuk memenuhi layanan SPBE serta sertifikasi apabila diperlukan untuk dapat menyesuaikan penggunaan TI dan sistem yang dikembangkan

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian perancangan EA SPBE domain Proses Bisnis pada studi kasus Diskominfo Kabupaten Purwakarta dapat mengambil kesimpulan, yaitu perancangan yang dengan acuan utama rencana strategis Perpres No.95 tahun 2018 tentang SPBE dalam mengerjakan artefak EA menggunakan TOGAF ADM. Ada beberapa fase yang terdapat pada perancangan EA SPBE dalam penelitian ini yang dimulai dari fase *preliminary*, fase *architecture vision*, dan fase *arsitektur proses bisnis*. Di setiap fase EA SPBE dalam penelitian ini menghasilkan *output* berupa artefak yang isinya *matrix*, *catalog* dan *diagram*. Sebagai arahan proses bisnis yang sesuai dengan PermenPANRB No.19 tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis terdapat fase utama dalam perancangan penelitian EA SPBE ini yakni fase *arsitektur proses bisnis* yang menghasilkan artefak model peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1 sampai dengan level 12, peta relasi dan peta proses bisnis lintas fungsi serta ada beberapa aplikasi eksisting yang menghubungkan aktivitas proses bisnis dengan aplikasi eksisting yang digunakan pada setiap proses bisnis.

- [3] KemenPANRB. (2020-2024). Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi .
- [4] Kuru, G. S., Gumilang, S. F., & Nugraha, R. A. (2021). Model Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Domain Proses Bisnis Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika*.
- [5] Mulya, F. A. (2021). Analisa Proses Bisnis dengan Business Process Modelling Notation (BPMN) pada PD. Simpati Sumedang.
- [6] Puspasari, F., Fahrurrozi, I., Oktiawati, U. Y., & Prima, T. (2020). Development of embedded system in monitoring temperature and humidity as supporting smart farm. *International Conference on Science Education and Technology*.
- [7] Putri, V. D., Gumilang, S. F., & Nugraha, R. A. (2021). *Domain Aplikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan*.

REFERENSI

- [1] Assa'diyah, K. H. (2021). *Perancangan Arsitektur Enterprise Untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Aplikasi Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi*.
- [2] KemenPANRB. (2018). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

